

Lamintang, P.A.F. 1994. *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung :Armico

Latief, M, Syihabuddin 1999, *Jalan Kemanusiaan Panduan untuk Memperkuat Hak Asasi Manusia*, Jogjakarta: Laperta Pustaka Utama

Lubis, T. Mulya , 1997. *Hak Asasi Manusia dan Pembangunan*. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia

Peraturan Perundang -Undangan

Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Undang-undang N o.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 1999 tentang syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan

Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M.04.UM.01.06 tahun 1983 tanggal 29 Desember tentang tata cara penempatan, Perawatan Tahanan dan Tata Tertib Rumah Tahanan Negara

Keputusan Menteri Kehakiman No. M.02-PK.04.10 tahun 1990 tanggal 10 April tentang Pola Pembinaan Tahanan

Keputusan Bersama Menteri Kehakiman RI dan Menteri Kesehatan RI nomor: M.01UM.01.06 Tahun 1987 dan nomor: 65/Menkes/ SKB/II/1987 tentang Pembinaan Upaya Kesehatan Masyarakat di Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasarakatan

Lembar Fakta No. 31, 2008. Hak Atas Kesehatan, (Geneva, Switserland: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights dan World Health Oeganization

Internet

<http://lapasbarelangbatam.blogspot.com> Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Batam

[https://id.wikipedia.org/wiki/Hak Asasi Manusia](https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_Asasi_Manusia)